

# Pemberitaan Kinerja Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Periode 2025–2030 (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Struktur Berita Pembangunan Fisik Kota Jakarta di Media Tribun Jakarta Bulan Februari–Maret 2026)

## *Media Coverage of the Performance of the Jakarta Governor–Deputy Governor Pair for the 2025–2030 Term (A Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough of the Structure of News Reports on Jakarta’s Physical Development in Tribun Jakarta from February to March 2026)*

Ali Rachman

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding author: Ali Rachman. [alirachman1180@gmail.com](mailto:alirachman1180@gmail.com)

### ABSTRAK

Di tengah dinamika Jakarta sebagai kota global yang multikultural, budaya Betawi sebagai identitas kultural masyarakat asli Jakarta menghadapi tantangan serius berupa marginalisasi simbolik, komodifikasi, dan fragmentasi makna. Dalam konteks ini, kepemimpinan politik memegang peran strategis dalam membangun, menegosiasikan, dan memproyeksikan identitas budaya melalui praktik komunikasi publik dan kebijakan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tampil sebagai aktor politik yang secara eksplisit mengangkat kebudayaan Betawi ke dalam ruang-ruang strategis kota melalui berbagai inisiatif kebijakan, narasi publik, dan representasi simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi budaya yang dilakukan oleh Rano Karno berfungsi sebagai mekanisme pembentukan dan penguatan identitas kebudayaan Betawi dalam konteks Jakarta yang multikultural, modern, dan sarat kontestasi kepentingan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana bahasa, simbol, kebijakan, dan wacana publik digunakan untuk memposisikan Betawi tidak sekadar sebagai warisan folklor, tetapi sebagai identitas kultural dan politik yang hidup di tengah tata kelola kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif, dengan bertumpu pada teori komunikasi budaya dan konstruksi identitas. Data dianalisis untuk memahami peran Wakil Gubernur sebagai cultural broker yang menegosiasikan hubungan antara kekuasaan negara, identitas lokal, dan tuntutan kota global. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi dan kepemimpinan berbasis budaya, sekaligus memberikan rujukan praktis bagi perumusan strategi komunikasi dan kebijakan pelestarian budaya lokal di kota multikultural.

**Kata Kunci:** Komunikasi Budaya, Identitas Kebudayaan, Betawi, Rano Karno, Kepemimpinan Budaya

### ABSTRACT

Amid the dynamics of Jakarta as a multicultural global city, Betawi culture, as the cultural identity of Jakarta’s indigenous community, faces significant challenges in the form of symbolic marginalization, commodification, and fragmentation of meaning. In this context, political leadership plays a strategic role in constructing, negotiating, and projecting cultural identity through public communication practices and policy initiatives. Jakarta Deputy Governor Rano Karno has emerged as a political actor who explicitly promotes Betawi culture within the city’s strategic spheres through various policy initiatives, public narratives, and symbolic representations. This study aims to analyze how the cultural communication employed by Rano Karno functions as a mechanism for constructing and strengthening Betawi cultural identity within the context of a multicultural, modern Jakarta characterized by competing interests. Specifically, this research examines how language, symbols, policies, and public discourse are utilized to position Betawi not merely as a folkloric heritage but as a living cultural and political identity embedded within urban governance. This study adopts a qualitative approach using a descriptive-interpretive method, drawing upon theories of cultural communication and identity construction. The data are analyzed to understand the role of the Deputy Governor as a cultural broker who negotiates the relationship between state power, local identity, and the demands of a global city. The findings are expected to enrich the scholarship on communication and culturally based leadership while also providing practical references for the formulation of communication strategies and policies aimed at preserving local culture in multicultural cities.

**Keywords:** Cultural Communication, Cultural Identity, Betawi, Rano Karno, Cultural Leadership

#### ARTICLE IDENTIFIERS

##### ORIGINAL ARTICLE

Vol. 9 No. 9, September 2026

Pages 4479-4486

DOI: 10.56338/jks.v9i9.11945

#### ARTICLE HISTORY

Received: 30 July 2026

Revised: 29 August, 2026

Accepted: 11 September, 2026

Publish: 30 September, 2026

## PENDAHULUAN

Jakarta sebagai kota global berada dalam ketegangan permanen antara modernitas, multikulturalisme, dan tuntutan pelestarian identitas lokal. Dalam dinamika ini, budaya Betawi-sebagai identitas kultural masyarakat asli Jakarta-mengalami tekanan struktural akibat urbanisasi, migrasi, komersialisasi budaya, serta dominasi narasi nasional dan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa budaya Betawi berada dalam situasi *identity vulnerability* (kerentanan identitas), ditandai oleh pergeseran dialek, transformasi ritual, dan fragmentasi simbol budaya dalam ruang kota modern (Oktaviani & Dewi, 2024; Reza et al., 2024; Marhaeni et al., 2026). Meskipun berbagai tradisi seperti Palang Pintu, bahasa Betawi, dan simbol visual terus dipertahankan, keberlanjutannya semakin bergantung pada bagaimana budaya tersebut diartikulasikan, dikomunikasikan, dan dinegosiasikan di ruang kekuasaan dan kebijakan publik (Fatmawati et al., 2024; Nur, 2025).

Dalam konteks inilah, peran kepemimpinan politik menjadi sangat strategis. Literatur kepemimpinan berbasis budaya menunjukkan bahwa identitas kolektif suatu komunitas tidak hanya diwariskan, tetapi dikonstruksi secara aktif melalui komunikasi simbolik, narasi politik, dan praktik representasi oleh para pemimpinnya. Studi de Santibañes, Ospina, dan Lee (2023) menunjukkan bahwa identitas kepemimpinan berbasis budaya berkembang secara dialektis melalui kontestasi antara sejarah, tuntutan komunitas, dan medan politik. Pemimpin bukan hanya aktor administratif, melainkan *cultural brokers* yang menerjemahkan nilai-nilai komunitas ke dalam bahasa kekuasaan, kebijakan, dan simbol publik. Hal ini sejalan dengan Brant (2021) dan Gram-Hanssen (2021) yang menekankan bahwa kepemimpinan berbasis budaya dan relasional memungkinkan identitas kolektif bertahan di tengah tekanan modernitas.

Lebih jauh, kajian komunikasi politik masyarakat adat dan minoritas budaya menunjukkan bahwa media, bahasa, dan simbol populer memainkan peran krusial dalam membangun imajinasi kolektif dan legitimasi politik identitas budaya. Di negara-negara Nordik, musik, drama televisi, dan jurnalisme adat menjadi sarana pembentukan kesadaran Sámi lintas batas negara (Josefsen & Skogerbo, 2021). Di Bolivia, media komunitas menjadi ruang artikulasi resistensi kultural dan pembentukan identitas politik etnis (Ramos-Martín & Barrientos-Garrido, 2024). Sementara itu, narasi meta seperti *Land Back* di Amerika Utara berfungsi sebagai kerangka simbolik yang menyatukan kebijakan, identitas, dan gerakan sosial (Pieratos et al., 2021). Keseluruhan literatur ini menegaskan bahwa identitas budaya tidak dapat dipisahkan dari praktik komunikasi politik dan representasi simbolik para pemimpinnya.

Dalam konteks Jakarta, Wakil Gubernur Rano Karno muncul sebagai figur politik yang secara eksplisit memosisikan kebudayaan Betawi sebagai agenda strategis kota. Melalui berbagai inisiatif seperti penyusunan *grand design* pengembangan Setu Babakan, dorongan memasukkan dialek Betawi ke dalam kurikulum sekolah, promosi Abang None ke level internasional, serta percepatan Peraturan Daerah (Perda) Adat Betawi, Rano Karno tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memproduksi narasi publik tentang siapa itu “Betawi” dalam Jakarta masa kini. Pernyataan bahwa budaya Betawi harus tampil di “ruang strategis kota” menunjukkan bahwa kebudayaan tidak diposisikan sebagai warisan pasif, melainkan sebagai identitas politik yang harus hadir dalam arena perencanaan kota, pendidikan, transportasi, dan diplomasi budaya.

Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Burgess dan Lowe (2022) dalam konteks pendidikan Aborigin di Australia dan Reza dan Ullah (2023) dalam konteks bahasa minoritas di Bangladesh, terdapat risiko serius ketika budaya lokal hanya dijadikan retorika kebijakan tanpa transformasi praksis dan pengakuan kedaulatan simbolik komunitas. Ketegangan antara retorika pelestarian dan realitas birokratis seringkali menghasilkan *symbolic inclusion* tanpa substantive empowerment. Hal ini relevan dengan Betawi yang hidup di tengah dominasi struktur kota modern dan kepentingan ekonomi Jakarta sebagai kota global.

Karena itu, komunikasi budaya Rano Karno sebagai Wakil Gubernur tidak dapat dipahami semata sebagai promosi budaya, tetapi sebagai arena dialektika antara kekuasaan negara, identitas lokal, dan imajinasi masa depan Jakarta. Sejalan dengan konsep *decolonial leadership* (Jimenez-Luque, 2021), penggunaan identitas budaya oleh pemimpin dapat menjadi sumber resistensi simbolik terhadap dominasi narasi pembangunan

yang meminggirkan komunitas asli. Pertanyaannya bukan hanya apakah Rano Karno mempromosikan Betawi, tetapi bagaimana ia membingkai Betawi: sebagai folklor, sebagai komoditas pariwisata, atau sebagai subjek politik dan kultural yang memiliki hak atas ruang kota dan arah pembangunan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana komunikasi budaya Wakil Gubernur Rano Karno membangun, menegosiasikan, dan memproyeksikan identitas kebudayaan Betawi dalam konteks Jakarta kontemporer. Dengan memadukan perspektif kepemimpinan berbasis budaya, komunikasi politik identitas, dan dinamika kebudayaan Betawi, studi ini bertujuan mengungkap bagaimana simbol, bahasa, kebijakan, dan narasi publik digunakan untuk membentuk makna Betawi sebagai identitas kolektif di tengah modernisasi dan multikulturalisme Jakarta.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur pengaruh secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana komunikasi budaya Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno membangun, membingkai, dan menegosiasikan identitas kebudayaan Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota multikultural dan modern.

Pendekatan deskriptif-interpretatif memungkinkan peneliti menelusuri makna di balik praktik komunikasi, simbol, dan kebijakan budaya, serta bagaimana semua itu diproduksi dan dipahami dalam konteks kekuasaan dan ruang publik. Dengan demikian, metode ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menekankan analisis peran komunikasi budaya sebagai mekanisme konstruksi identitas.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebagai aktor komunikasi politik dan cultural broker, serta pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, penyebaran, dan penerimaan komunikasi budaya Betawi, seperti pejabat pemerintah daerah, pelaku budaya Betawi, dan media yang merepresentasikan kebijakan dan wacana kebudayaan Betawi.

Sementara itu, objek penelitian ini adalah praktik dan wacana komunikasi budaya Rano Karno dalam membingkai, merepresentasikan, dan menegosiasikan identitas kebudayaan Betawi melalui pidato, kebijakan, simbol, program budaya, dan representasi media dalam konteks Jakarta sebagai kota multikultural dan modern.

### **Teknik Pengumpulan Data**

**Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:**

#### **Wawancara mendalam (in-depth interview)**

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (atau yang mewakili) serta informan kunci lain yang terlibat atau memiliki pemahaman langsung tentang kebijakan dan praktik komunikasi budaya Betawi, seperti pejabat Dinas Kebudayaan, pelaku seni Betawi, dan tokoh komunitas budaya. Wawancara ini bertujuan menggali makna, strategi, dan pertimbangan simbolik di balik komunikasi budaya yang dilakukan dalam konteks pemerintahan dan ruang publik Jakarta.

#### **Observasi partisipatif dan non-partisipatif**

Observasi dilakukan terhadap berbagai kegiatan kebudayaan Betawi yang melibatkan Rano Karno, seperti festival budaya, peresmian ruang budaya, pertunjukan seni, atau acara seremonial resmi. Observasi ini difokuskan pada cara simbol Betawi ditampilkan, bagaimana pesan budaya disampaikan, serta bagaimana interaksi antara Wakil Gubernur dan publik berlangsung dalam peristiwa komunikasi tersebut.

### **Studi dokumentasi dan analisis media**

Dokumentasi mencakup analisis terhadap pidato resmi, pernyataan publik, kebijakan kebudayaan, berita media massa, serta konten media sosial Rano Karno yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi. Data ini digunakan untuk menelusuri narasi, simbol, dan representasi identitas Betawi yang dikonstruksi dan disirkulasikan dalam ruang komunikasi publik.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif interpretatif dengan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang dipadukan dengan analisis makna simbolik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

#### **Reduksi data berbasis tema komunikasi budaya**

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti: bentuk komunikasi budaya, simbol dan narasi Betawi, peran kepemimpinan Rano Karno, serta respons terhadap dinamika multikultural Jakarta.

#### **Penyajian data dalam matriks dan narasi tematik**

Data yang telah dikodekan disajikan dalam bentuk matriks tematik, peta konsep, dan kutipan naratif untuk memperlihatkan keterkaitan antara aktor (Rano Karno), pesan budaya, media yang digunakan, dan makna identitas Betawi yang dibangun.

#### **Penafsiran dan penarikan makna**

Tahap ini tidak hanya menarik kesimpulan deskriptif, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap bagaimana komunikasi budaya Rano Karno membentuk, menegosiasikan, dan memperkuat identitas kebudayaan Betawi dalam ruang publik Jakarta, dengan merujuk pada teori komunikasi budaya dan identitas.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan penelitian ini dijamin melalui empat kriteria Lincoln dan Guba (1985) yang diterapkan secara terpadu, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dibangun melalui kesesuaian logis antara tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran komunikasi budaya Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam membangun dan memaknai identitas kebudayaan Betawi, dengan objek penelitian berupa praktik komunikasi budaya serta data yang dikumpulkan dari pidato, pernyataan publik, dan aktivitas kebudayaan, sehingga tidak terdapat jarak antara apa yang ingin dijelaskan, yang diteliti, dan yang dianalisis.

*Transferability* dijaga melalui penyajian *thick description* yang menggambarkan secara rinci konteks Jakarta sebagai kota multikultural, posisi Rano Karno sebagai figur publik Betawi, serta simbol dan praktik budaya yang dikomunikasikan, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan bagi konteks lain.

*Dependability* ditunjukkan melalui kejelasan desain metodologis penelitian kualitatif deskriptif, termasuk prosedur pengumpulan dan analisis data yang disajikan secara sistematis dan transparan, sehingga alur penelitian dapat dipahami dan ditelusuri.

Sementara itu, *confirmability* dipenuhi melalui penyediaan jejak audit berupa dokumentasi data, proses pengodean, dan dasar penafsiran makna, sehingga kesimpulan penelitian dapat dilacak kembali pada bukti empiris yang digunakan dan tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas peneliti.

## **HASIL**

### **Gambaran Umum Komunikasi Budaya Rano Karno**

Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam kebudayaan Betawi, Rano Karno menempatkan pelestarian budaya sebagai salah satu agenda strategis pemerintahan.

Berbagai kebijakan dan komunikasi publik yang disampaikan menunjukkan upaya sistematis untuk mengembalikan budaya Betawi sebagai identitas utama Jakarta.

Komunikasi budaya yang dilakukan tidak hanya berupa penyampaian pesan melalui pidato resmi, tetapi juga diwujudkan melalui simbol-simbol budaya, kebijakan pemerintah, kegiatan kebudayaan, serta representasi di media massa dan media sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi budaya digunakan sebagai instrumen untuk membangun kesadaran publik mengenai posisi budaya Betawi dalam pembangunan kota.

Dalam perspektif komunikasi budaya, praktik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai produsen makna budaya (*producer of cultural meaning*). Melalui komunikasi yang konsisten, pemerintah membangun narasi bahwa Betawi merupakan identitas yang harus hadir dalam seluruh ruang kehidupan kota.

Bentuk Komunikasi Budaya yang Digunakan Rano Karno

Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat bentuk komunikasi budaya utama.

### **Komunikasi Melalui Kebijakan Publik**

Komunikasi budaya diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain: penyusunan Grand Design Setu Babakan; percepatan Rancangan Perda Masyarakat Adat Betawi; penguatan muatan lokal budaya Betawi di sekolah; revitalisasi kawasan budaya.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk komunikasi simbolik negara yang menegaskan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Betawi.

Menurut teori komunikasi budaya, kebijakan merupakan bentuk pesan institusional yang memiliki legitimasi tinggi karena mampu mengubah simbol budaya menjadi aturan formal.

### **Komunikasi Simbolik**

Rano Karno secara konsisten menggunakan simbol-simbol budaya Betawi dalam berbagai kegiatan resmi, seperti: pakaian adat Betawi; bahasa Betawi; Palang Pintu; ondel-ondel; tanjidor; gambang kromong; kuliner khas Betawi.

Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai penanda identitas kolektif yang memperkuat memori budaya masyarakat.

Mach (1993) menjelaskan bahwa simbol merupakan media utama dalam membangun solidaritas sosial dan batas identitas kelompok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa simbol budaya yang digunakan Rano Karno bukan sekadar ornamen seremoni, melainkan instrumen komunikasi politik.

### **Komunikasi Melalui Media**

Media massa dan media sosial menjadi saluran utama penyebaran narasi budaya.

Publikasi mengenai festival budaya, peringatan Hari Betawi, promosi Abang Nene Jakarta, maupun aktivitas Wakil Gubernur di ruang publik memperlihatkan upaya membangun citra Jakarta sebagai kota modern yang tetap mempertahankan akar budayanya.

Media dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang produksi identitas sebagaimana dijelaskan Riggins (1992), bahwa media berperan dalam membentuk sekaligus mempertahankan identitas budaya kelompok.

### **Komunikasi Partisipatif**

Komunikasi budaya juga dilakukan melalui melibatkan masyarakat. Festival budaya, diskusi kebudayaan, kegiatan komunitas, hingga kolaborasi dengan seniman menunjukkan bahwa komunikasi tidak berlangsung secara satu arah.

Masyarakat menjadi aktor aktif dalam memproduksi makna budaya sehingga identitas Betawi dibangun secara kolektif.

### **Negosiasi Identitas Kebudayaan Betawi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi budaya Rano Karno tidak hanya bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga melakukan negosiasi identitas. Negosiasi tersebut tampak dalam beberapa bentuk.

### **Betawi sebagai Identitas Jakarta**

Narasi yang dibangun menempatkan Betawi sebagai identitas resmi Jakarta. Budaya Betawi diposisikan bukan sebagai budaya minoritas, melainkan fondasi historis kota.

Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya memperkuat legitimasi tersebut sehingga masyarakat memperoleh pemahaman bahwa Jakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Betawi.

### **Betawi sebagai Budaya Modern**

Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap budaya Betawi. Budaya tidak lagi direpresentasikan sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai budaya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Promosi budaya melalui media digital, festival kreatif, serta diplomasi budaya internasional menunjukkan adanya transformasi identitas menuju budaya yang dinamis.

Temuan ini sesuai dengan teori identitas budaya Chen (2017) yang menyatakan bahwa identitas selalu berkembang mengikuti perubahan sosial.

### **Betawi sebagai Identitas Politik**

Komunikasi budaya juga menghasilkan penguatan posisi politik masyarakat Betawi. Dorongan pembentukan Perda Adat Betawi memperlihatkan bahwa identitas budaya mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan formal. Dengan demikian, budaya tidak lagi hanya menjadi objek pelestarian, tetapi memperoleh ruang dalam proses pengambilan kebijakan publik.

### **Komunikasi Budaya dalam Merespons Jakarta sebagai Kota Multikultural**

Jakarta merupakan kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, komunikasi budaya yang dilakukan Rano Karno tidak mengarah pada eksklusivitas budaya, tetapi membangun prinsip inklusivitas. Budaya Betawi diposisikan sebagai "tuan rumah" yang terbuka terhadap seluruh masyarakat.

Narasi tersebut memperlihatkan bahwa identitas lokal tidak bertentangan dengan keberagaman, melainkan menjadi perekat sosial.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi budaya digunakan untuk menciptakan kohesi sosial tanpa menghilangkan identitas kelompok lain.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi budaya Rano Karno memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, sebagai media konstruksi identitas budaya.

Melalui simbol, bahasa, kebijakan, dan media, identitas Betawi terus diproduksi dalam ruang publik. Temuan ini menguatkan pandangan Nagel (1994) bahwa identitas budaya merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan institusi.

Kedua, komunikasi budaya berfungsi sebagai strategi legitimasi politik.

Budaya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sehingga memperoleh legitimasi formal. Hal ini memperkuat teori Bailey dan Harindranath (2007) mengenai hubungan erat antara komunikasi, representasi, dan kekuasaan.

Ketiga, komunikasi budaya berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial.

Alih-alih menciptakan eksklusivitas etnis, komunikasi budaya justru membangun narasi kebersamaan dalam masyarakat multikultural.

Dengan demikian, Rano Karno dapat dipahami sebagai cultural broker yang menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat Betawi, dan warga Jakarta secara umum.

Walaupun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan berupa potensi simbolisasi budaya yang berlebihan apabila tidak diikuti implementasi kebijakan yang nyata. Pelestarian budaya memerlukan dukungan anggaran, regulasi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat agar tidak berhenti pada level seremonial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi budaya merupakan instrumen penting dalam membangun identitas lokal di tengah dinamika kota global.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi budaya yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memiliki peran strategis dalam membangun, memperkuat, dan merepresentasikan identitas kebudayaan Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota multikultural dan modern.

Pertama, komunikasi budaya dilakukan melalui berbagai bentuk, yaitu komunikasi kebijakan, komunikasi simbolik, komunikasi media, dan komunikasi partisipatif. Keempat bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dalam membangun narasi bahwa budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta. Kedua, komunikasi budaya menghasilkan proses negosiasi identitas yang menempatkan Betawi bukan sekadar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai identitas yang hidup, berkembang, dan memiliki legitimasi dalam kebijakan publik. Simbol budaya, bahasa, dan berbagai program pemerintah menjadi media untuk membangun makna baru mengenai posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan kota.

Ketiga, komunikasi budaya Rano Karno mampu merespons tantangan multikulturalisme dengan menempatkan budaya Betawi sebagai identitas yang inklusif. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian budaya lokal dapat berjalan berdampingan dengan keberagaman masyarakat Jakarta tanpa menimbulkan eksklusivitas budaya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa identitas budaya merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui komunikasi, simbol, dan kebijakan publik. Sementara secara praktis, penelitian menunjukkan pentingnya kepemimpinan budaya dalam menjaga keberlanjutan identitas lokal di tengah proses modernisasi dan globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbinnett, R. (2003). *Culture and identity: critical theories*.
- Bailey, O. G., & Harindranath, R. (2007). Ethnic minorities, cultural difference and the cultural politics of communication. *International Journal of Media & Cultural Politics*, 2(3), 299-316.
- Bhatia, S. (2007). Rethinking culture and identity in psychology: Towards a transnational cultural psychology. *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology*, 27(2-1), 301.
- Bird, K., Saalfeld, T., & Wüst, A. M. (2010). Ethnic diversity, political participation and representation: A theoretical framework. In *The political representation of immigrants and minorities* (pp. 21-42). Routledge.
- Brant, D. (2021). *The impact of culture on Indigenous leadership* (Doctoral dissertation).
- Burgess, C., & Lowe, K. (2022). Rhetoric vs Reality: The Disconnect between Policy and Practice for Teachers Implementing Aboriginal Education in Their Schools. *Education Policy Analysis Archives*, 30(97).
- Chen, G. M. (2017). Cultural identity. *International Encyclopedia of Intercultural Communication*.
- Chen, Y. W., & Lin, H. (2016). Cultural identities. In *Oxford research encyclopedia of communication*.
- Chiang, C. Y. (2010). Diasporic theorizing paradigm on cultural identity. *Intercultural Communication Studies*, 19(1), 29-46.
- Chow-Garcia, N., Lee, N., Svihla, V., Sohn, C., Willie, S., Holsti, M., & Wandinger-Ness, A. (2022). Cultural identity central to Native American persistence in science. *Cultural Studies of Science Education*, 17(2), 557-588.
- Darvin, R., & Sun, T. (2024). *Intercultural communication and identity*. Cambridge University Press.

- de Santibañes, M., Ospina, S. M., Lee, S., Santamaria, A., Evans, M. M., Muelas, D., & Guerrero, N. (2023). The dialectics of leadership identity construction: Case studies from Indigenous women leaders. *Leadership*, 19(4), 366-390.
- Fatmawati, A. W., Wulandari, F., Alifa, N. P., & Gumala, Y. (2024). Systematic Literature Review: Palang Pintu as Betawi Culture Tradition. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 10151-10165.
- Gadjanova, E. (2013). What is an ethnic appeal? Policies as metonymies for ethnicity in the political rhetoric of group identity. *Ethnopolitics*, 12(3), 307-330.
- Gram-Hanssen, I. (2021). Individual and collective leadership for deliberate transformations: Insights from Indigenous leadership. *Leadership*, 17(5), 519-541.
- Himpele, J. D. (2008). *Circuits of culture: Media, politics, and indigenous identity in the Andes* (Vol. 20). U of Minnesota Press.
- Jimenez-Luque, A. (2021). Decolonial leadership for cultural resistance and social change: Challenging the social order through the struggle of identity. *Leadership*, 17(2), 154-172.
- Josefsen, E., & Skogerbo, E. (2021). Indigenous political communication in the Nordic countries.
- Kuper, A. (1994). Culture, identity and the project of a cosmopolitan anthropology. *Man*, 537-554.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Liu, J. H., & Sibley, C. G. (2009). Culture, social representations, and peacemaking: A symbolic theory of history and identity. In *Peace psychology in Asia* (pp. 21-39). New York, NY: Springer US.
- Mach, Z. (1993). *Symbols, conflict, and identity: Essays in political anthropology*. SUNY Press.
- Malešević, S. (2006). Ethnic and National Identity: The Conceptual Critique. In *Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism* (pp. 13-36). London: Palgrave Macmillan UK.
- Marhaeni, P. P., Emor, K. A., Kangiden, D. A., Silvi, A., & Beng, J. T. (2026). Budaya Betawi Di Persimpangan Globalisasi: Upaya Menjaga Identitas Lokal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 938-945.
- Mendoza, S. L., Halualani, R. T., & Drzewiecka, J. A. (2002). Moving the discourse on identities in intercultural communication: Structure, culture, and resignifications. *Communication Quarterly*, 50(3-4), 312-327.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nagel, J. (1994). Constructing ethnicity: Creating and recreating ethnic identity and culture. *Social problems*, 41(1), 152-176.
- Nur, T. (2025) Betawi Culture as an Instrument for Language Preservation: A Sociolinguistic Analysis of Betawi Culture and Language. *International Journal of Current Science Research and Review* 08(09), DOI: 10.47191/ijcsrr/V8-i9-09
- Oktaviani, A., Dewi, R. S., & Juwandi, R. (2024). Analisis modifikasi budaya dalam perspektif krisis identitas etnis Betawi. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Paleczny, T., & Zieliński, B. (2008). Cultural Identity. *Politeja*, (10/1), 353-372.
- Pieratos, N. A., Manning, S. S., & Tilsen, N. (2021). Land back: A meta narrative to help indigenous people show up as movement leaders. *Leadership*, 17(1), 47-61.
- Ramos-Martín, J., & Barrientos-Garrido, M. R. (2024). Political Identity and the Indigenous Media in Bolivia: Ethnicity, Politics, and Communication. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*.
- Reza, F., & Ullah, M. (2023). Preserving and promoting indigenous languages of ethnic minorities in Bangladesh: A strategic planning framework. *Prithvi Academic Journal*, 120-135.
- Reza, F., Rohmah, Z., & Ismail, R. (2024). Dialect shift and cultural dynamism among Betawi community in urban Jakarta in Palang Pintu and Rebut Dandang traditional ceremonies. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2410542.
- Riggins, S. H. (1992). The media imperative: Ethnic minority survival in the age of mass communication. *Ethnic minority media: An international perspective*, 1-20.
- Soguk, N. (2009). Communication/excommunication: Transversal indigenous diplomacies in global politics. In *Indigenous diplomacies* (pp. 29-46). New York: Palgrave Macmillan US.